

Mohammad Faisal, Etikah Karyani, dkk.

REVITALISASI & INDUSTRIALISASI

**Kunci Akselerasi
Ekonomi Indonesia**



CORE
INDONESIA

REVITALISASI & INDUSTRIALISASI

Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia

Penulis: Mohammad Faisal, Etikah Karyani, Achmad Hanif Imaduddin, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, Eliza Mardian, Fitri Yana, Huzni Mubarok, Lailatun Nikmah, Muhammad Dzaki Fahd Haekal, Rivan Dwi Aghnitama, Sahaya Aulia Azzahra

Penasihat: Hendri Saparini

Penyunting: Mohammad Faisal, Etikah Karyani, Akhmad Akbar Susanto, Muhammad Ishak Razak, Fitri Yana, Achmad Hanif Imaduddin

Perancang Sampul: Ratih Ramadyawati

Penata Letak: Amanda Yuliana

14 x 21 cm | 322 halaman

Cetakan Pertama, Januari 2026

Edisi Terbatas

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis.

Diterbitkan Oleh:

PT CORE NUSA PERKASA

REVITALISASI & INDUSTRIALISASI

Kunci Akselerasi Ekonomi Indonesia

Mohammad Faisal, Etikah Karyani, Achmad Hanif Imaduddin,
Azhar Syahida, Dwi Setyorini, Eliza Mardian, Fitri Yana, Huzni
Mubarok, Lailatun Nikmah, Muhammad Dzaki Fahd Haekal,
Rivan Dwi Aghnitama, Sahaya Aulia Azzahra

© PT CORE NUSA PERKASA



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

“Saat ini, transformasi, industrialisasi-hilirisasi, untuk meningkatkan nilai tambah tinggi, adalah agenda penting pembangunan nasional (RPJMN 2025-2029 dan 2025-2045). Tujuannya, antara lain, adalah agar Indonesia dapat keluar dari *middle income trap*, sekaligus dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, makin makmur dan bisa sejahtera bersama sama. Buku ini memberikan diagnosis tajam dan rekomendasi peta jalan yang relevan bagi kebijakan nasional untuk tujuan itu. Karena itu, buku ini layak jadi salah satu referensi penting untuk menyelaraskan visi, strategi dan kebijakan lintas sektor menuju Indonesia Emas 2045.”

—**Rachmat Pambudy**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala BAPPENAS

“Pelaku usaha merasakan langsung tantangan regulasi, pembiayaan, dan persaingan global yang digambarkan dalam buku ini. Analisisnya ringkas dan praktis, sehingga dapat menjadi pegangan bagi pengusaha dalam memahami sektor strategis dan peluang investasi.”

—**Shinta Kamdani**, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nasional

“Ekspor hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan jika ditopang oleh industrialisasi yang kuat. Buku ini menguraikan hambatan struktural sekaligus menawarkan solusi untuk memperkuat rantai pasok, kualitas, dan kapasitas produksi. Bagi para eksportir, buku ini merupakan sumber bacaan penting untuk bersaing di pasar global.”

—**Benny Soetrisno**, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia

“Buku ini memberikan sumbangan strategis bagi kajian industrialisasi di Indonesia, yang sering kali terpinggirkan dalam wacana pembangunan. Analisisnya berbasis data dengan pendekatan kontemporer yang relevan bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan kalangan akademisi. Sebagai sebuah karya, buku ini membuka ruang refleksi kritis mengenai bagaimana industrialisasi dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi nasional.”

—**Agustinus Prasetyantoko**, Anggota Badan Supervisi OJK dan Rektor Universitas Katolik Atma Jaya 2015–2023

Mohammad Faisal, Etikah Karyani, dkk.

REVITALISASI & INDUSTRIALISASI

**Kunci Akselerasi
Ekonomi Indonesia**

SEKAPUR SIRIH

Mohammad Faisal

DENGAN menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya yang dengan izin dari-Nya kami dapat mempersembahkan buku berjudul “Revitalisasi & Industrialisasi: Studi Kebijakan Pembangunan di Indonesia”. Buku ini diterbitkan sebagai wujud kepedulian kami terhadap pentingnya mendorong transformasi ekonomi Indonesia melalui industrialisasi khususnya dalam menyongsong periode pemerintahan baru. Buku ini merupakan buah pemikiran dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta di berbagai sektor strategis, serta para pakar dan akademisi.

Sebagai lembaga *think-tank* di bidang ekonomi, CORE Indonesia berpandangan bahwa transformasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mutlak membutuhkan pembenahan dan revitalisasi industri manufaktur sebagai mesin penggerak ekonomi terbesar. Terlebih lagi, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, jauh di atas catatan historis pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari dua dekade terakhir.

Bagi Indonesia, menghindari jebakan kelas menengah adalah kebutuhan mendesak. Ekonomi Indonesia memang tumbuh stabil di kisaran lima persen, lebih tinggi dari rata-rata negara berkembang yang hanya 3,7 persen menurut data International Monetary Fund (IMF) 2025.

Namun, laju ini tetap mencerminkan inersia yang tidak sepadan dengan potensi besar sumber daya alam dan manusia yang dimiliki. Stagnasi ini sudah tampak bahkan sebelum krisis Covid-19 tahun 2020. Sejak 2022, Indonesia berstatus negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income*). Setelah 23 tahun berada di kelompok menengah bawah (*lower-middle income*). Menurut klasifikasi World Bank, perjalanan dari menengah atas ke negara maju jauh lebih panjang dan berat. Jika pertumbuhan tetap stagnan di angka lima persen, Indonesia akan terjebak di kelas menengah atas (*middle-income trap*) atas lebih lama daripada saat berada di menengah bawah yang dapat mengulang pola kegagalan sejumlah negara seperti Brasil dan Afrika Selatan.

Untuk menghindari jebakan kelas menengah, Indonesia harus mendorong pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen per tahun dan menjaga konsistensinya selama beberapa dekade. Upaya ini harus dimulai sekarang, selagi bonus demografi masih berlangsung yakni saat proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dari yang non-produktif, untuk menghasilkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang paling rendah. Setelah masa ini lewat, peluang mendorong pertumbuhan tinggi akan jauh lebih sulit. Namun hingga kini, produktivitas belum menunjukkan lonjakan berarti. Pengangguran, terutama di kalangan muda, masih tinggi, dan sebagian besar angkatan kerja masih terserap di sektor informal—bahkan meningkat sejak pandemi. Produktivitas tenaga kerja juga tertinggal dibanding sejumlah negara-negara *peer*, seperti Malaysia dan Thailand.

Sebagai kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, industri manufaktur mengalami perlambatan yang konsisten selama dua dekade terakhir. Gejala deindustrialisasi tampak dari menurunnya kontribusi sektor ini terhadap PDB dan lajunya yang terus berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Meski deindustrialisasi bukan fenomena eksklusif, bagi negara berkembang seperti Indonesia, kondisi ini patut diwaspadai karena bersifat prematur.

Artinya, deindustrialisasi terjadi sebelum industrialisasi mencapai tahap matang dan sebelum pendapatan per kapita mendekati tingkat negara maju. Akibatnya, negara-negara berkembang kehilangan momentum untuk mendorong industrialisasi lebih lanjut sebagai fondasi mengejar ketertinggalan ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah berupaya mengubah arah industrialisasi dengan mendorong pembangunan industri pengolahan komoditas tambang melalui kebijakan hilirisasi. Investasi mulai mengalir ke sektor manufaktur, terutama pada industri turunan komoditas seperti logam dasar, yang turut mendorong lonjakan ekspor produk-produk hilir. Namun, peningkatan investasi dan ekspor ini belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melampaui lima persen. Sebagai negara yang telah mengembangkan sektor industrinya selama lebih dari empat dekade, Indonesia seharusnya sudah mampu bersaing di industri padat modal dan teknologi tinggi yang bernilai tambah besar, bukan hanya mengandalkan industri padat karya berbasis upah murah—yang kini kian tertekan oleh persaingan dari negara-negara seperti Vietnam.

Untuk memecah kebuntuan pertumbuhan, revitalisasi industri menjadi keharusan. Ini menuntut arah kebijakan yang jelas dan terukur, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga mengingat kompleksitas isu industri yang melampaui domain Kementerian Perindustrian. Target pembangunan industri juga semestinya menjadi indikator kinerja bagi seluruh kementerian terkait, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang selaras agar efektivitas paket kebijakan industri benar-benar tercapai.

Buku ini membahas secara rinci sepuluh sektor ekonomi strategis yang bersumber dari berbagai literatur dan aspirasi berbagai pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, akademisi, pengamat, dan regulator. Selain aspek permasalahan dan tantangan yang dihadapi, masukan dan usulan bagi pengambil kebijakan untuk dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pembahasan sektor mencakup

sektor yang berkaitan langsung dengan industri manufaktur, seperti industri makanan dan minuman, besi baja, petrokimia, perikanan, serta kosmetik. Selain itu, sektor-sektor pendukung yang krusial bagi terwujudnya industrialisasi, termasuk energi baru dan terbarukan, jasa pemastian, serta jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan teknologi finansial. Melalui buku *Revitalisasi & Industrialisasi: Studi Kebijakan Pembangunan di Indonesia*, kami berharap isi dan analisis yang disajikan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pengambil kebijakan serta mengedukasi masyarakat dalam mendorong industrialisasi dan membangun perekonomian nasional yang tangguh, kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Jakarta, September 2025

CORE Indonesia

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH—ix

Mohammad Faisal

DAFTAR ISI—xiii

PENDAHULUAN—1

Etikah Karyani

1	Revitalisasi Industri Besi dan Baja: Strategi Penguatan Hulu dan Pengendalian Impor—9	
	Azhar Syahida, Muhammad Dzaki Fahd Haekal	
1.1	Posisi Strategis Industri Besi dan Baja	10
1.1.1	Keterbatasan Rantai Pasok Hulu: Pasokan, Impor, dan Harga Bahan Baku	15
1.1.2	Kebijakan Strategis Meredakan Problem Hulu Industri Besi dan Baja	18
1.2	Pengembangan <i>Roadmap</i> Industri Hulu Besi-Baja	20
1.2.1	Akses Pasar Industri Besi dan Baja	21
1.2.2	Kebijakan Strategis Meredakan Problem Akses Pasar Industri Besi dan Baja	23
1.2.3	Regulasi Impor dalam Mengembangkan Industri Besi dan Baja	25
1.3	Kebijakan Strategis Meredakan Serbuan Impor Produk Besi dan Baja	27
	Referensi	29

2 Revitalisasi Industri Petrokimia: Tata Kelola, Akselerasi Investasi dan Penguatan Ekosistem Terintegrasi—31

Lailatun Nikmah, Achmad Hanif Imaduddin

2.1	Petrokimia sebagai Pilar Strategis Industri Nasional	33
2.2	Tantangan Struktural dan Strategi Revitalisasi dalam Pengembangan Industri Petrokimia	35
2.2.1	Volatilitas Harga Bahan Baku Mengganggu Produksi Nasional	35
2.2.2	Ketergantungan Impor dan Kesulitan Ekspor Melemahkan Daya Saing	37
2.2.3	Stabilisasi Harga Bahan Baku dengan <i>Hedging</i> dan Kontrak Jangka Panjang	40
2.2.4	Pengembangan Ekosistem Terintegrasi untuk Kemandirian Industri Nasional	40
2.3	Regulasi dan Tata Kelola	41
2.3.1	Inkoherensi Kebijakan dalam Ekosistem Petrokimia Nasional	42
2.3.2	Keterbatasan Peran Negara	44
2.3.3	Konsolidasi Kebijakan dan Penguatan Peran Negara	45
2.4	Tantangan Skala Produksi dan Dinamika Investasi Baru	46
2.4.1	Stagnasi Kapasitas Produksi Nasional	47
2.4.2	Dilema Investasi Awal untuk Pengembangan Industri	49
2.5	Penguatan Kluster Industri dan Inovasi Pembiayaan untuk Akselerasi Investasi Petrokimia	51
	Referensi	53

3 Revitalisasi Industri Kosmetik: Perlindungan Konsumen, Skala Produksi, dan Daya Saing Global—57

Lailatun Nikmah, Sahaya Aulia Azzahra

3.1	Perlindungan Konsumen	60
3.1.1	Ketidaksesuaian Produk dengan Standar Baku Mutu	61
3.1.2	Rendahnya Tingkat Sertifikasi: Krisis Kepatuhan Menjelang Tenggat Waktu	64
3.1.3	Praktik Iklan yang Menyesatkan	67
3.1.4	Strategi Terpadu untuk Perlindungan Konsumen di Industri Kosmetik	70
3.1.5	Kompleksitas Akses Pasar dan Dinamika Regulasi Industri Kosmetik Indonesia	71
3.2	Strategi <i>Branding Global</i> Berbasis Budaya Lokal dalam Industri Kosmetik	77
3.2.1	Permasalahan Produksi: Keterbatasan R&D dan Skala Industri	78
3.2.2	Minimnya alokasi dana untuk R&D	78
3.2.3	Minimnya Jumlah Industri Skala Besar	81
3.2.4	Stagnasi Kredit dan Minimnya Investasi di Industri Kosmetik	83
3.2.5	Penguatan Akses Permodalan bagi Industri Kosmetik melalui Kolaborasi Keuangan	85
	Referensi	87

4 Industri Makanan dan Minuman: Reformasi Regulasi, Stabilitas Bahan Baku, dan Akses Pasar—93

Huzni Mubarok, Muhammad Dzaki Fahd Haekal

4.1	Kontribusi Ekonomi, Daya Saing Global, dan Arah Kebijakan Strategis	94
4.2	Ketidaksinkronan Regulasi Impor dan Pajak: Hambatan Struktural dan Solusi	101
4.2.1	Regulasi Terkait Ekspor dan Impor yang Belum Berpihak pada Industri Domestik	102
4.2.2	Regulasi Terkait Perpajakan yang Berubah-ubah dan Menambah Biaya	102
4.3	Strategi Menghadapi Tantangan Regulasi	103
4.3.1	Sinkronisasi Regulasi Terkait Bea dan Cukai Untuk Produk Bahan Baku dan Konsumsi	104
4.3.2	Pajak yang Berkeadilan Bagi Produsen dan Konsumen	104
4.4	Ketersediaan Bahan Baku	105
4.4.1	Ketidakstabilan Pasokan Bahan Baku Pangan dan Ketergantungan Impor	106
4.4.2	Ketidakstabilan Harga Bahan Baku Pangan	108
4.4.3	Rekomendasi Strategi Menghadapi Tantangan Ketersediaan Bahan Baku	109
4.5	Adopsi Teknologi di Industri Mamin: Kebutuhan Mendesak untuk Daya Saing Berkelanjutan	111
4.5.1	Insentif Untuk Adopsi Teknologi Bagi Industri Makanan dan Minuman	113
4.5.2	Strategi Peningkatan Akses Pasar dan Daya Saing Industri Makanan dan Minuman	113
4.5.3	Persaingan Dengan Produk Impor	114

4.6	Tantangan Dalam Memasuki Pasar Ekspor	115
4.7	Strategi Mengatasi Tantangan Akses Pasar	117
	Referensi	121

5 Revitalisasi Industri Perikanan Nasional: Solusi Struktural untuk Produktivitas, Nilai Tambah, dan Akses Pasar—125

Eliza Mardian, Sahaya Aulia Azzahra

5.1	Posisi Strategis Indonesia dalam Perikanan Global	127
5.2	Kondisi Produksi Perikanan Indonesia	128
5.2.1	Produksi Perikanan Tangkap	128
5.2.2	Produksi Perikanan Budidaya	129
5.3	Tantangan Kunci Pengelolaan Perikanan di Indonesia	130
5.3.1	Over-eksploitasi Sumber Daya Perikanan	130
5.3.2	Lonjakan Kasus <i>Illegal Fishing</i> : Bukti Lemahnya Tata Kelola Perikanan	130
5.3.3	Minimnya Pengawasan Perikanan	131
5.3.4	Rendahnya Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nelayan	132
5.3.5	Terbatasnya Akses Permodalan	133
5.3.6	Rendahnya Investasi di Sektor Perikanan	134
5.3.7	Minimnya ukuran kapal dan alat tangkap	136
5.3.8	Strategi Komprehensif Penguatan Hulu Perikanan untuk Keberlanjutan dan Daya Saing	137
5.3.9	Sistem pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat	137
5.3.10	Optimalisasi produksi berkelanjutan menjadi kunci keberlanjutan sumber daya perikanan.	137
5.3.11	Modernisasi armada dan alat tangkap menjadi prasyarat peningkatan produktivitas.	138

5.4	Distribusi dan Industri Pengolahan	138
5.4.1	Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas Pengolahan	139
5.4.2	Permasalahan di Sektor Distribusi dan Pengolahan	140
5.5	Transformasi Distribusi dan Pengolahan Perikanan: Rekomendasi Strategis untuk Infrastruktur dan Daya Saing Ekspor	142
5.5.1	Distribusi dan Pengolahan Produk Perikanan	142
5.6	Hambatan Ekspor	144
5.6.1	Kesenjangan Akses terhadap Sertifikasi Berkelanjutan	144
5.6.2	Biaya dan Kompleksitas Sertifikasi	145
5.6.3	Kompleksitas Regulasi Ekspor dan Ketidakharmonisan Standar Perdagangan Global	145
5.6.4	Rendahnya Nilai Tambah dan Ketergantungan Pasar dalam Ekspor Perikanan	146
5.7	Rekomendasi Strategi Penguatan Ekspor Perikanan: Dari Sertifikasi hingga Diversifikasi Pasar	147
5.7.1	Fasilitasi Sertifikasi untuk Nelayan Skala Kecil	147
5.7.2	Transformasi Produk ke Nilai Tambah Tinggi	148
5.7.3	Diversifikasi Pasar Ekspor	148
5.7.4	Harmonisasi Regulasi dan Peningkatan Efisiensi Ekspor	148
5.7.5	Penguatan Sistem Informasi dan Akses Pasar	149
	Referensi	151



Peran Energi Baru dan Terbarukan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan—153

Sahaya Aulia Azzahra

6.1	Dinamika Regulasi dan Kebijakan Transisi Energi di Indonesia	155
6.1.1	Konsistensi Kebijakan Energi yang Belum Baik	156
6.1.2	Regulasi yang Belum Mendukung Iklim Investasi EBT yang Kondusif	158
6.1.3	Belum Adanya Skema Insentif EBT yang Memadai	159
6.1.4	Minimnya Koordinasi dan Sinergi Antar-kementerian dan Lembaga	164
6.1.5	Strategi Institusional dan Fiskal: Rekomendasi Akselerasi Transisi Energi Nasional	165
6.2	Investasi dan Pendanaan yang Belum Memadai	168
6.2.1	Minimnya APBN untuk Riset dan Pengembangan Teknologi EBT	168
6.2.2	Minimnya Investasi Swasta untuk EBT	170
6.2.3	Belum Lengkapnya Kelembagaan Investasi EBT	171
6.2.4	Belum Optimalnya Pajak Karbon	173
6.2.5	Skema KPBU Belum Optimal	174
6.3	Infrastruktur dan Teknologi yang Belum Memadai	175
6.3.1	Tingginya Biaya Instalasi Pembangkit Listrik EBT	176
6.3.2	Keterbatasan Data Spasial dalam Perencanaan Pengembangan EBT Berbasis Wilayah	177
6.3.3	Ketertinggalan Infrastruktur Kritis untuk Mendukung Integrasi EBT	177

6.3.4	Terbatasnya Kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkait Hilirisasi Hasil Riset	178
6.3.5	Rekomendasi Kelembagaan, Teknologis, dan Infrastruktur dalam Mendukung EBT Nasional	179
6.4	Ketimpangan Harga dan Rendahnya Literasi Publik	182
6.4.1	Distorsi Harga dan Ketidaksetaraan Kompetisi antara EBT dan Fosil	182
6.4.2	Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat terkait Urgensi Penggunaan EBT	183
6.5	Mekanisme Penetapan Harga EBT yang Kompetitif	184
	Referensi	186

7 Peran Sektor Keuangan dalam Mendorong Sektor Manufaktur—191

Etikah Karyani, Rivan Dwi Aghnitama, Dwi Setyorini

7.1	Intermediasi Perbankan dan Agenda Industrialisasi: Revitalisasi Fungsi, Inklusi, dan Digitalisasi	193
7.1.1	Fungsi intermediasi yang belum optimal	194
7.1.2	Keterbatasan Transformasi Digital Perbankan dalam Inklusi Rendah, Risiko Siber Tinggi, dan Keterbatasan Talenta	203
7.1.3	Krisis SDM, Inklusi Rendah, dan Minimnya Inovasi Produk Perbankan Syariah	206
7.1.4	Inefisiensi dan Skala Terbatas Perbankan Indonesia	210
7.2	Mewujudkan Industri Asuransi yang Tangguh: Antara Kepatuhan, Perlindungan, dan Perluasan Pasar	215
7.2.1	Peningkatan Akses dan Penetrasi Perlindungan Asuransi	215

7.2.2	Menjelajahi dan Menerapkan Asuransi Wajib dalam Skala Nasional	216
7.2.3	Penetrasi Industri	217
7.2.4	Aspek Governance, Risk, and Compliance	226
7.2.5	Aspek Dukungan Pemerintah	236
7.3	Menata Ekosistem Fintech: Akses Data, Perlindungan Konsumen, dan Reformasi Regulasi	239
7.3.1	Dinamika Ekosistem <i>Fintech</i> dan Tingkat Kematangan Model Bisnis	240
7.3.2	Tantangan Konektivitas, dan Akses Data, dan Keamanan	245
7.3.3	Pasar dan Kompetisi	247
7.3.4	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	250
7.3.5	Krisis Talenta <i>Fintech</i> Nasional	252
7.3.6	Regulasi Tidak Adaptif dan Beban Kepatuhan <i>Fintech</i>	253
	Referensi	256

8

Peran Jasa Pemastian dalam Mendorong Daya Saing Sektor Manufaktur—261

Fitri Yana, Rivan Dwi Aghnitama

8.1	Transformasi dan Kontribusi Jasa TIC dalam Ekosistem Industri Nasional	263
8.1.1	Membangun Kepercayaan Konsumen Lokal	263
8.1.2	Kebutuhan TIC untuk Pasar Global	264
8.1.3	Kebutuhan TIC yang Berbeda-beda Antar Sektor Manufaktur	265
8.1.4	Keberadaan dan Perkembangan Jasa TIC di Indonesia	268

8.2	Tantangan Struktural Industri TIC Nasional dalam Meningkatkan Daya Saing Global	269
8.2.1	Keterbatasan Kapasitas Teknologi dan Inovasi	270
8.2.2	Keterbatasan Cakupan Layanan dan Transfer Pengetahuan	272
8.2.3	Keterbatasan SDM Berpengalaman Internasional	272
8.2.4	Rendahnya Pengakuan dan Akses Regulasi Internasional	274
8.3	Peta Jalan Penguatan Industri TIC: Integrasi Teknologi, SDM, dan Regulasi Global	275
8.3.1	Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Inovasi Digital Industri TIC	276
8.3.2	Peningkatan Integrasi Layanan dan Ekspansi Cakupan Pasar TIC	277
8.3.3	Pengembangan SDM TIC Berstandar Internasional dan Mobilitas Global	278
8.3.4	Harmonisasi Regulasi, Peningkatan Akses Internasional, dan Reformasi Standardisasi	279
	Referensi	282

PENUTUP—285

Etikah Karyani

APRESIASI KONTRIBUSI—288

PROFIL PENULIS—293

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). "PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (Milyar Rupiah)". (2025). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/-seri-2010-pdb-seri-2010.html>.
- Badan Standardisasi Nasional. 2023. Laporan Kinerja 2023 Pusat Pengembangan SDM SPK. Pusat Pengembangan SDM SPK.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). "Press Release: BSN Dukung Implementasi SPBE Melalui Layanan Akreditasi". (2024).
- Boston Consulting Group (BCG). "Five-Year Growth Strategy". (2024).
- CORE Indonesia. "Penyusunan Regulatory Impact Assessment (RIA) Rancangan Permenperin Tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib". (2024)
- Fortune Business Insight. "Testing, Inspection & Certification (TIC) Market". (2024). Accessed October 2024. <https://www.fortunebusinessinsight.com/testing-inspection-certification-tic-market-104939>.
- IndustryARC. "Indonesia TIC Industry Outlook – Forecast (2022-2027)". (2021). Accessed June 2025. <https://www.industryarc.com/Report/20010/indonesia-tic-market.html>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2024. Lembaga Validasi/Verifikasi. Accessed October 20, 2024. <https://srn.menlhk.go.id/index.php?r=lvv%2Findex>.
- Kementerian Perdagangan. 2023. Kemendag Musnahkan Produk Mainan Anak yang Diduga Tidak Sesuai SNI. Agustus 28. Accessed October

- 20, 2024. <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/berita/kemendag-musnahkan-produk-mainan-anak-yang-diduga-tidak-sesuai-sni>.
- Mordor Intelligence. "Detailed Market Report on The Testing, Inspection & Certification (TIC) Market, Covering Industry Trends, Size Analysis From 2025 to 2030". (2025). Accessed June 2025. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/testing-inspection-and-certification-market>.
- Straits Research. "Testing, Inspection, and Certification Market Size, Share, Report to 2023". (2023). Accessed June 2025. <https://straitsresearch.com/report/testing-inspection-and-certification-tic-market>.
- Susanto, Danar Agus, Ellia Kristiningrum, Ajun Tri Setyoko, Meilinda Ayundyahrini, Renanta Hayu Kresiyani, and Aditya Achmadi. 2021. "Sebaran dan Rasio Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap Industri di Indonesia." *Jurnal Standarisasi* 171-182.
- TIC Council. Value of the Testing, Inspection and Certification Sector. Europe Economic (2020).
- Wibowo, Ari. 2018. "Pengetahuan Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Produk Bertanda SNI." *Jurnal Standarisasi* 119-128.

CORE
INDONESIA
CENTER OF REFORM ON ECONOMICS

“Buku ini memberikan diagnosis tajam dan rekomendasi peta jalan yang relevan bagi kebijakan nasional untuk tujuan itu. Karena itu, buku ini layak jadi salah satu referensi penting untuk menyelaraskan visi, strategi dan kebijakan lintas sektor menuju Indonesia Emas 2045.”

—**Rachmat Pambudy**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

“Pelaku usaha merasakan langsung tantangan regulasi, pembiayaan, dan persaingan global yang digambarkan dalam buku ini. Analisisnya ringkas dan praktis, sehingga dapat menjadi pegangan bagi pengusaha dalam memahami sektor strategis dan peluang investasi.”

—**Shinta Kamdani**, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nasional

“Ekspor hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan jika ditopang oleh industrialisasi yang kuat. Buku ini menguraikan hambatan struktural sekaligus menawarkan solusi untuk memperkuat rantai pasok, kualitas, dan kapasitas produksi. Bagi para eksportir, buku ini merupakan sumber bacaan penting untuk bersaing di pasar global.”

—**Benny Soetrisno**, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia

“Buku ini memberikan sumbangan strategis bagi kajian industrialisasi di Indonesia, yang sering kali terpinggirkan dalam wacana pembangunan. Sebagai sebuah karya, buku ini membuka ruang refleksi kritis mengenai bagaimana industrialisasi dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi nasional.”

—**Agustinus Prasetyantoko**, Anggota Badan Supervisi OJK dan Rektor Universitas Katolik Atma Jaya 2015–2023

“CORE Indonesia (*Center of Reform on Economics*) merupakan lembaga *think-tank* independen yang berdiri pada tahun 2013, dan berfokus pada penelitian, advokasi serta konsultasi di bidang ekonomi, kebijakan publik dan bisnis.”